

**TESIS**

**LEGALITAS PENYADAPAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS JAKSA**

**GUNA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**GUGI DOLANSYAH**

**1820112076**

**PEMBIMBING I :Dr. ARIA ZURNETTI, S.H., M.Hum**

**PEMBIMBING II : Dr. YOSERWAN S.H., M.H., LL.M**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2022**

**LEGALITAS PENYADAPAN (WIRETAPING) DALAM PELAKSANAAN  
TUGAS JAKSA GUNA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
GUGI DOLANSYAH, NIM 1820112076, 97 Halaman, Program Magister Ilmu  
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2022**

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi telah digolongkan menjadi tindak pidana luar biasa. Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Penyadapan merupakan salah satu cara yang dianggap efektif dalam penindakan tindak pidana korupsi meskipun penyadapan seringkali dianggap melanggar privasi seseorang. Penyadapan tidak diatur dalam undang-undang Kejaksaan namun diatur dalam Undang-Undang KPK. Pada penelitian ini penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Kedudukan Penyadapan dalam Pembuktian tindak pidana korupsi? 2) Bagaimanakah Legalitas Penyadapan (*Intersepsi*) Oleh Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder (data yang berasal dari penelitian kepustakaan). Penulis berdasarkan hasil penelitian menemukan: 1) Penyadapan dalam pembuktian termasuk dalam bukti petunjuk berupa dokumen elektronik yang memiliki peran besar dalam menggungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi 2) Jaksa dalam melakukan penyadapan harus menjelaskan tujuan dari penyadapan tersebut, harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan setempat dan dokumen elektronik hasil penyadapan haruslah berisi tentang dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki oleh penyidik.

Kata Kunci: Kejaksaan, Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi

# **THE LEGALITY OF TAPPING ON THE IMPLEMENTATION OF PROSECUTOR'S DUTY ON HANDLING THE CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION**

**(Gugi Dolansyah, 1820112076, , Master of Law Study Program, Faculty of Law, Andalas University, 97 Pages, 2022)**

## **ABSTRACT**

The criminal acts of corruption has always received more attention than other crimes in various parts of the world. The criminal acts of corruption is a violation of social rights and economic rights of the society, consequently the criminal acts of corruption has been classified as an extraordinary crime. The criminal acts of corruption occurs systematically and widespread, not only detrimental to the country's financial and economy, but also a violation of the social and economic rights of the society, it is classified as an extraordinary crime, consequently its eradication must be carried out in an extraordinary way. Tapping is a way that is considered effective in prosecuting the criminal acts of corruption, although Tapping is often considered a violation of someone's privacy. Tapping is not regulated on the Prosecutor's Law but it is regulated on the KPK Law. In this study, author finds the formulation of the problem as follows: 1) What is the position of Tapping in the authentication of the criminal acts of corruption? 2) What is the legality of Tapping by the Prosecutors in handling the criminal acts of corruption? This research uses normative juridical research method. The types of data used are primary data and secondary data (the data derived from library research). Based on the results of the study, the author finds: 1) In authentication Tapping included in the evidence of instructions in the form of electronic documents which have a major role in uncovering allegations of the criminal acts of corruption that occurred 2) the prosecutor in conducting the Tapping must explain the purpose of the Tapping, must obtain permission from the Head of the local Court and the electronic document resulting from the Tapping must contain the alleged crime being investigated by the investigator.

**Keyword: Public Prosecutor's Office, Tapping, The Criminal Acts Of Corruption**